

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Kekayaan Negara Dipisahkan

Menurut undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara merupakan kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Kekayaan Negara Dipisahkan tersebut merupakan pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selanjutnya digunakan sebagai penyertaan modal pada BUMN/Badan Hukum Lainnya dan kemudian pengelolaannya terpisah dari mekanisme APBN. Adapun objek kekayaan negara dipisahkan menurut UU Nomor 17 tahun 2003 pasal 2 huruf g antara lain:

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- b. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH)
- c. Lembaga Keuangan Internasional (LKI)
- d. Badan Hukum Lainnya (BHL), seperti Bank Indonesia, Lembaga
- e. Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan BPJS.

Presiden merupakan kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan kekayaan negara dipisahkan yang kemudian dikuasakan pada Menteri keuangan selaku bendahara

umum negara (BUN). Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2003, menteri keuangan selaku wakil pemerintah memiliki kewenangan dalam mengelola kekayaan dipisahkan yang kuasanya dapat dikuasakan lagi kepada Menteri BUMN. Adapun pengecualian tugas dan kewenangan atas pelimpahan kedudukan menteri keuangan kepada Menteri BUMN adalah sebagai berikut:

- a. penatausahaan setiap penyertaan modal negara dan perubahannya ke dalam Persero, Perseroan Terbatas dan Perum, serta kegiatan penatausahaan kekayaan negara yang dimanfaatkan oleh Perjan;
- b. pengusulan setiap penyertaan modal negara ke dalam Persero, Perseroan Terbatas dan Perum yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta pemanfaatan kekayaan negara dalam Perjan; dan
- c. pendirian Persero, Perum, atau Perjan dan perubahan bentuk hukum Perjan.

Dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara dipisahkan dilakukan oleh Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan yang berada di bawah Direktorat Jenderal kekayaan Negara sebagaimana tercantum dalam PMK Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Adapun fungsi Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan dalam melaksanakan tugasnya di bidang kekayaan negara dipisahkan menurut pasal 1285 229/PMK.01/2019 adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan rumusan kebijakan;
- b. menyiapkan pelaksanaan kebijakan;
- c. menyiapkan susunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;

- d. menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi;
- e. menyiapkan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- f. melaksanakan urusan tata usaha.

2.2 Konsep Dasar Badan Usaha Milik Negara

Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, Badan Usaha Milik Negara atau disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN merupakan wujud dari kekayaan negara dipisahkan. BUMN dikategorikan sebagai kekayaan dipisahkan dipisahkan karena terpisah dari APBN secara mekanisme dan secara korporasi. Adapun maksud dan tujuan didirikannya BUMN adalah:

- a. memberikan berkontribusi terhadap perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara;
- b. mengejar keuntungan;
- c. menyelenggarakan kemanfaatan umum yaitu penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat;
- d. merintis kegiatan usaha yang belum dapat dilakukan sektor lain seperti swasta dan koperasi; dan
- e. ikut aktif dalam membimbing dan membantu pengusaha dengan ekonomi yang lemah, koperasi, dan masyarakat.

Modal BUMN diperoleh melalui penyertaan modal negara atau PMN yang bersumber dari

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);

- b. kapitalisasi cadangan; dan
- c. sumber lainnya.

PMN yang bersumber dari APBN dan perubahannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah sedangkan penambahan atas penyertaan dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya ditetapkan oleh RUPS atau Menteri untuk selanjutnya dilaporkan pada Menteri Keuangan.

BUMN dibagi menjadi Persero dan Perusahaan Umum (Perum). Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Tujuan dari Perum adalah untuk kemanfaatan umum yaitu penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu, juga untuk mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Berikut ini rangkuman perbedaan Persero dan Perum.

Tabel II.1 Perbandingan Persero dan Perum

Perbedaan	Persero	Perum
Tujuan	Mencari laba	Melayani kepentingan masyarakat, seperti menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip perusahaan
Modal	Modal terbagi atas saham dan paling sedikit 51% sahamnya dimiliki negara	Seluruh modal berasal dari negara dan tidak terbagi atas saham
Organ	RUPS, Direksi, dan Komisaris	Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas

Sumber: diolah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003

2.3 Konsep *Holding*

Salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan adalah *holding*. *Holding* perusahaan dikelompokkan menjadi dua yaitu induk dan anak perusahaan. Mekanisme *holding* dilakukan dengan cara pengalihan saham.

Dasar hukum pembentukan *holding* BUMN di Indonesia tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas. Adanya *holding* BUMN tidak membuat saham negara pada perusahaan tersebut menjadi berkurang melainkan telah beralih dengan perusahaan induknya. Peralihan saham tersebut dicatat sebagai penyertaan modal negara kepada BUMN yang menjadi perusahaan induk.

Tujuan utama pembentukan *holding* adalah untuk meningkatkan manajemen perusahaan sehingga terbentuk sinergi. Adapun dampak pembentukan *holding* BUMN berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2016.

- a. Penyertaan modal negara atau PMN ke BUMN yang sebelumnya sudah ada saham milik negara dapat dialihkan pada BUMN lain selama sumber PMN tersebut berasal dari aset negara lainnya dan selanjutnya pengelolaannya diluar mekanisme APBN.
- b. Pengalihan saham ke induk perusahaan tidak membuat jumlah saham yang dimiliki negara menjadi berkurang dalam neraca pemerintah.

- c. Negara tetap memiliki saham dengan hak istimewa yaitu saham seri A dwiwarna sehingga kontrol negara terhadap anak perusahaan tetaplah sama dan dapat dimanfaatkan

2.4 Konsep Analisis Kinerja Keuangan

Analisis kinerja keuangan merupakan suatu alat analisis keuangan yang dirancang untuk melihat sejauh mana perusahaan telah menerapkan aturan pelaksanaan keuangan yang baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis menggunakan alat- alat analisis tertentu, sehingga dapat diketahui keadaan finansial perusahaan yang dapat mencerminkan pencapaian kerja perusahaan tersebut. Pihak manajemen dapat melakukan penilaian kinerja keuangan sebagai salah satu upaya agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para pemegang saham dan juga untuk mengevaluasi demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan adalah rasio keuangan. Menurut Kasmir (2013), rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka- angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Dalam mengerjakan analisis kinerja keuangan penulis wajib memiliki *benchmark* agar nilai yang di dapat memiliki arti. *Benchmark* adalah tolak ukur dalam melakukan perbandingan. Rasio digunakan sebagai dasar yang ideal dalam melakukan perbandingan karena menggambarkan nilai yang sebanding secara vertikal ataupun horizontal dengan bentuk persentase. Horizontal berarti antar perusahaan yang sejenis dan sebanding sedangkan vertikal yaitu antar tahun

historis suatu perusahaan. Adapun pengertian dan rumus dari tiap-tiap rasio yang akan digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

2.4.1 Rasio Likuiditas

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, likuiditas merupakan suatu hal yang berhubungan dengan posisi uang kas suatu perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo tepat pada waktunya atau disebut juga kemampuan memenuhi kewajiban membayar utang dan sebagainya pada waktunya. Menurut Kasmir (2013) rasio likuiditas adalah rasio yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini juga melihat seberapa likuid aktiva lancar suatu perusahaan yang dapat digunakan untuk melunasi kewajiban jatuh tempo yang dimilikinya. Rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang tinggi sehingga dapat membayar kewajiban-kewajibannya untuk pembiayaan aktivitas perusahaan.

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}}$$

Rasio lancar berfungsi untuk mengukur seberapa besar aktiva lancar yang ada untuk digunakan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang nantinya akan jatuh tempo. Rasio yang lebih tinggi berarti likuiditas perusahaan yang lebih besar. Hal ini berarti perusahaan memiliki kemampuan yang tinggi untuk memenuhi kewajiban lancarnya. Perusahaan dengan likuiditas yang bagus biasanya memiliki rasio lancar dengan perbandingan 2:1. Apabila hasil perhitungan rasio lancar perusahaan mencapai lebih dari 100% berarti perusahaan dianggap memiliki kemampuan

yang baik dalam memenuhi kewajiban lancarnya tanpa mempengaruhi proses bisnis perusahaan yang ada.

2.4.2 Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio yang berfungsi mengukur efektivitas suatu perusahaan untuk mengolah aset yang dimiliki. Menurut Kasmir (2003), rasio ini digunakan dalam mengukur efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki seperti penjualan, persediaan, penagihan piutang, dan lain-lain.

1. *Total Asset turnover*

$$\text{Total Asset Turnover} = \frac{\text{Sales}}{\text{Total Asset}}$$

Rasio perputaran total asset adalah rasio yang digunakan untuk mengukur bagaimana perusahaan dapat menghasilkan penjualan dengan menggunakan asetnya. Rasio ini akan menunjukkan berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari setiap rupiah aset yang dimiliki. Apabila perhitungan rasio menunjukkan hasil yang semakin tinggi berarti perusahaan telah melakukan pengelolaan asset perusahaan dengan semakin baik dan efisien.

2. *Fixed Asset Turnover*

$$\text{Fixed Asset Turnover} = \frac{\text{Sales}}{\text{Fixed Asset}}$$

Rasio perputaran asset tetap adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi sebuah perusahaan dalam menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan pendapatan. Rasio ini menunjukkan berapa kali dana perusahaan yang telah ditanamkan pada *fixed asset* untuk proses kegiatan bisnis perusahaan. Apabila hasil rasio menunjukkan angka yang semakin besar maka hal tersebut berarti perusahaan

telah menggunakan aset tetap dengan optimal dalam proses bisnisnya. Hal tersebut berlaku sebaliknya, apabila hasil rasio kecil berarti terdapat beberapa atau banyak aset tetap yang *idle* atau tidak digunakan berdasarkan tugas dan fungsi perusahaan dan dalam hal ini perusahaan dianggap belum mampu menggunakan aset secara maksimal.

2.4.3 Rasio Profitabilitas

Rasio Profitabilitas adalah rasio yang berfungsi mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan perusahaan baik dalam hal aktivitas perdagangannya (pendapatan penjualan) dan juga berapa banyak yang diinvestasikan untuk mendapatkan pengembalian tersebut (modal yang digunakan). Rasio ini juga mengukur tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan untuk menghasilkan pendapatan melalui seluruh kemampuan perusahaan dan segala sumber yang dimiliki perusahaan seperti kas, penjualan, ekuitas, jumlah cabang, dan lain-lain (Harahap,2009).

1. *Gross Profit Margin (GPM)*

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Revenue} - \text{COGS}}{\text{Sales Revenue}}$$

Margin laba kotor atau *Gross Profit Margin* adalah total penjualan perusahaan (*Revenue*) dikurangi total harga pokok penjualan (*COGS*) lalu dibagi pendapatan penjualan (*Sales Revenue*). Total harga pokok penjualan adalah jumlah dari semua biaya variabel yang terlibat dalam penjualan. Total penjualan adalah semua barang yang dijual oleh perusahaan. Apabila hasil perhitungan rasio bernilai positif hal ini berarti proses bisnis perusahaan mampu menghasilkan produk dan menjualnya dengan harga yang cukup untuk menutupi harga pokok penjualan (*COGS*). Margin

ini sangat penting dalam penghitungan *break-even point* untuk suatu bisnis.

2. *Net Profit Margin (NPM)*

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Sales Revenue}}$$

Margin laba bersih atau *NPM* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur persentase laba bersih perusahaan yang diperoleh dari total penjualan bersihnya. Apabila hasil rasio semakin tinggi berarti hasil kemampuan perusahaan dianggap baik untuk menciptakan pendapatan dari penjualan bersih produk/jasanya sebab perusahaan mampu menekan beban usaha dari harga penjualan yang ditetapkan. Rasio ini juga menggambarkan tingkat efisiensi yang baik dari pengelolaan biaya operasional perusahaan karena perusahaan dianggap mampu menekan beban usaha atas harga penjualan yang ditetapkan.

3. *Return on Asset (ROA)*

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Assets}}$$

Tingkat pengembalian aset atau *ROA* adalah rasio yang menunjukkan persentase pengembalian laba bersih atas jumlah aset yang digunakan perusahaan pada proses bisnisnya. Apabila hasil rasio menunjukkan angka yang semakin tinggi berarti tingkat efektivitas pemanfaatan aset semakin baik dalam menghasilkan keuntungan. Hal ini juga berarti bahwa perusahaan dianggap telah menggunakan asetnya dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat mendorong pertumbuhan keuntungan penjualan perusahaan.

4. *Return on equity (ROE)*

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Equity}}$$

Rasio pengembalian ekuitas atau *ROE* adalah rasio yang berfungsi untuk menentukan rentabilitas dari modal yang dimiliki perusahaan. Rasio ini juga dapat menjadi daya tarik bagi investor karena perusahaan yang memiliki hasil rasio yang baik maka hal tersebut menggambarkan pengembalian keuntungan yang dapat investor terima atas keuntungan bersih yang dihasilkan perusahaan. Apabila hasil perhitungan *ROE* menunjukkan angka yang semakin tinggi maka perusahaan dianggap semakin baik dalam melakukan pengelolaan modal dan ekuitas yang dimilikinya untuk menjalankan proses bisnis. Hal tersebut berlaku sebaliknya, apabila hasil perhitungan *ROE* perusahaan cenderung mendekati nol berarti perusahaan dianggap belum optimal dalam melakukan pengelolaan ekuitas untuk menghasilkan laba bersih.

5. *Operating Profit Margin (OPM)*

$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{\text{Revenue} - \text{COGS} - \text{Operating Expense}}{\text{Sales Revenue}}$$

Rasio margin laba operasi atau *OPM* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan setelah dikurangi beban operasional perusahaan.

2.4.4 Rasio Cakupan atau Rasio Solvabilitas

Menurut Kamir (2003a) rasio cakupan atau rasio solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana suatu aset perusahaan dibiayai dengan utang. Rasio ini

juga berguna untuk mengukur tingkat perlindungan bagi kreditur dan investor jangka panjang.

1. *Debt to Total Asset Ratio*

$$\text{Debt Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Assets}}$$

Rasio ini berfungsi mengukur perbandingan antara total utang dan total aset. Apabila hasil perhitungan rasio menunjukkan angka yang semakin kecil berarti perusahaan memiliki kondisi yang baik sebab hanya sedikit aset perusahaan yang dibiayai dengan utang. Hal tersebut berlaku sebaliknya, apabila hasil rasio menunjukkan angka yang lebih tinggi berarti perusahaan memiliki ketergantungan yang tinggi pada pembiayaan luar atau *financial leverage*. Dengan berjalannya waktu, pinjaman bunga akan semakin tinggi, kalau perusahaan memiliki utang yang besar, bunganya pun besar maka laba bersih perusahaan akan mengecil. Nilai rasio >0,5 mengindikasikan sebagian besar aset dibiayai oleh utang.

2. *Debt Equity Ratio (DER)*

$$\text{Debt Equity Ratio} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Equity}}$$

Debt Equity Ratio berfungsi membandingkan antara total utang dan modal atau ekuitas perusahaan. Rasio ini juga mengamati sebesar besar ekuitas perusahaan yang digunakan sebagai jaminan padan setiap utang yang dimiliki. Apabila hasil perhitungan rasio menunjukkan angka >1 berarti sebagian besar sumber pembiayaan perusahaan berasal dari utang. Hal tersebut berlaku sebaliknya, apabila hasil perhitungan rasio menunjukkan angka <1 berarti sumber pembiayaan utama perusahaan berasal dari modal perusahaan. Hasil perhitungan rasio yang

menunjukkan angka <1 dapat memberikan rasa aman bagi kreditur karena utang dan bunga yang ditanggung perusahaan lebih sedikit daripada modal sehingga semakin kecil risiko yang ditanggung.

2.5 Konsep Analisis *Paired Sampel T-test*

Uji parametric *paired sampel t-test* merupakan uji beda yang digunakan apabila sampel yang dimiliki berdistribusi normal. Uji parametric *paired sampel t-test* disebut juga uji t sampel berpasangan dan uji ini digunakan pada dua variable untuk menguji memiliki hipotesis sama atau tidak berbeda (H_0). Uji ini berfungsi untuk menentukan apakah terdapat perbedaan diantara rata-rata dua sampel. Biasanya dua sampel tersebut terdiri atas sampel yang sama namun mengalami perlakuan yang berbeda, contohnya sebelum dan sesudah dilakukannya *holding* perusahaan. Adapun langkah-langkah dalam melakukan uji parametric *paired sampel t-test* sebagai berikut.

1. Membuat hipotesis alternatif

- H_{a1} : Terdapat perbedaan pada rasio likuiditas yang diwakilkan dengan *current ratio* perusahaan pada sebelum dan sesudah menjadi anggota *holding*
- H_{a2} : Terdapat perbedaan pada rasio aktivitas yang diwakilkan dengan *total assets turnover* perusahaan pada sebelum dan sesudah menjadi anggota *holding*
- H_{a3} : Terdapat perbedaan pada rasio aktivitas yang diwakilkan dengan *fixed assets turnover* perusahaan pada sebelum dan sesudah menjadi anggota *holding*

- Ha4 : Terdapat perbedaan pada rasio profitabilitas yang diwakilkan dengan *Gross Profit Margin* perusahaan pada sebelum dan sesudah menjadi anggota *holding*
 - Ha5 : Terdapat perbedaan pada rasio profitabilitas yang diwakilkan dengan *Net Profit Margin* perusahaan pada sebelum dan sesudah menjadi anggota *holding*
 - Ha6 : Terdapat perbedaan pada rasio profitabilitas yang diwakilkan dengan *Return on Asset* perusahaan pada sebelum dan sesudah menjadi anggota *holding*
 - Ha7 : Terdapat perbedaan pada rasio profitabilitas yang diwakilkan dengan *Return on Equity* perusahaan pada sebelum dan sesudah menjadi anggota *holding*
 - Ha8 : Terdapat perbedaan pada rasio profitabilitas yang diwakilkan dengan *Operating Profit Margin* perusahaan pada sebelum dan sesudah menjadi anggota *holding*
 - Ha9 : Terdapat perbedaan pada rasio solvabilitas yang diwakilkan dengan *Debt to Total Asset Ratio* perusahaan pada sebelum dan sesudah menjadi anggota *holding*
 - Ha10 : Terdapat perbedaan pada rasio solvabilitas yang diwakilkan dengan *Debt to Equity Ratio* perusahaan pada sebelum dan sesudah menjadi anggota *holding*
2. Menentukan tingkat signifikansi yaitu ($\alpha = 5\%$)
 3. Membandingkan probabilitas dan taraf signifikansi

4. Menarik kesimpulan statistic

- Apabila nilai *Asymp Sig.* residual data $< \alpha=5\%$ (0,05) maka H_a dapat diterima
- Apabila nilai *Asymp Sig.* residual data $> \alpha=5\%$ (0,05) maka H_a dapat ditolak